

**KETERSEDIAAN SUMBERDAYA LAHAN DAN
AKSESIBILITAS DALAM UPAYA MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN**

Ari Tresna Sumantri¹, Nuniek Hermita^{1*}, Rifqi Ahmad Riyanto¹, Asih Mulyaningsih¹

¹Sultan Ageng Tirtayasa University, Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Serang, Banten, Indonesia

* Email: nuniekhermita@untirta.ac.id / +6285211111783

ABSTRACT

This research entitled Land Resources and Accessibility to Support Food Security. This study aims to present information on the availability of land resources and accessibility in an effort to support food security in the Pandeglang Regency. The method used in this research is descriptive research model method with survey techniques. The results showed that the potential and availability of land in Pandeglang Regency is quite extensive, which is dominated by forestry, rice fields and large plantations with mixed forest data of 86,517.33 Ha or about 31% of the area of land use in Pandeglang Regency. Meanwhile, 18.24% of the area of land use in Pandeglang Regency with a land area of 50,888.90 hectares consists of shrubs. The area of rice fields 34,391.28 or about 12.32% of the area of land use and land use is 47,893.65 or 17% of the area of land use. Measurement of the aspect of access to food uses indicators related to the condition of the population, including the percentage of poor people with the number of poor people in Pandeglang Regency 115.90 (thousand people), the percentage of the population without access to electricity with data that almost 100 percent of households use electricity either from PLN or NonPLN, and the percentage of the population not working is around 41.56%. In addition, in the area of Pnadeglang Regency there is a cooperative in the agricultural sector which is one of the infrastructure for providing food needs.

Keywords: accessibility, land, food, agriculture

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk penyajian informasi ketersediaan sumberdaya lahan dan aksesibilitas dalam upaya mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode model penelitian deskriptif dengan teknik survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi dan ketersediaan lahan di Kabupaten Pandeglang cukup luas yang didominasi oleh lahan kehutanan, pesawahan dan perkebunan besar dengan data hutan campuran 86.517,33 Ha atau sekitar 31% dari luas penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan 18,24% dari luas penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang dengan luas lahan 50.888,90 Ha terdiri dari hutan belukar. Luas lahan persawahan 34.391,28 atau sekitar 12,32% dari luas penggunaan lahan dan penggunaan untuk ladang adalah 47.893,65 atau 17% dari luas penggunaan lahan. Pengukuran aspek akses pangan menggunakan indikator-indikator yang terkait kondisi penduduk diantaranya yaitu persentase penduduk miskin dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang 115,90 (ribu orang),

persentase penduduk tidak akses listrik dengan data hampir 100 persen rumah tangga menggunakan listrik baik dari PLN maupun Non PLN, dan persentase penduduk tidak bekerja berkisar 41.56%. Selain itu di wilayah Kabupaten Pandeglang terdapat koperasi dibidang pertanian yang sebagai salah satu prasarana tempat menyediakan kebutuhan pangan.

Kata Kunci: aksesibilitas, lahan, pangan, pertanian

PENDAHULUAN

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah kabupaten yang terdapat di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang terkenal dengan potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi. Secara geologi, wilayah Kabupaten Pandeglang termasuk kedalam zona Bogor yang merupakan jalur perbukitan. Sedangkan jika dilihat dari topografi daerah Kabupaten Pandeglang memiliki variasi ketinggian antara 0 - 1.778 m di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar topografi daerah Kabupaten Pandeglang adalah dataran rendah yang berada di daerah Tengah dan Selatan yang memiliki luas 85,07% dari luas keseluruhan Kabupaten Pandeglang (Biro Pemerintahan Provinsi Banten, 2020). Kabupaten Pandeglang juga sebagai salah satu daerah yang mendapatkan predikat daerah lumbung pangan dan salah

satu penyuplai kebutuhan pangan nasional sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan di Indonesia.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Kementerian Pertanian, 2018). Ketersediaan lahan dan Aksesibilitas merupakan pilar yang mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan.

Ketersediaan lahan merupakan suatu ketersediaan lingkungan fisik berupa iklim, relief tanah, hidrologi, tumbuhan, dan sumberdaya lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan atau

kebutuhan manusia. Sedangkan Aksesibilitas adalah suatu indikator kemudahan atau kenyamanan mengenai cara untuk mencapai tujuan.

Menurut Anny Mulyani dan Fahmuddin Agus, 2017 bahwa Ketersediaan lahan untuk ekstensifikasi lahan pertanian menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan untuk mempertahankan swasembada pangan dan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia menjelang tahun 2045. Sedangkan Handewi P.S. Rachman, 2010 mengemukakan bahwa pentingnya aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan sebagai faktor kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

Berdasarkan Data BPS Kabupaten Pandeglang, 2019 bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang didominasi oleh lahan kehutanan, pesawahan dan perkebunan besar. Pada tahun 2019 lahan menurut penggunaan adalah hutan campuran 86.517,33 Ha atau sekitar 31% dari luas penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang.

Sedangkan 18,24% dari luas penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang dengan luas lahan 50.888,90 Ha terdiri dari hutan belukar. Luas lahan persawahan 34.391,28 atau sekitar 12,32% dari luas penggunaan lahan dan penggunaan untuk ladang adalah 47.893,65 atau 17% dari luas penggunaan lahan. Sedangkan data persentase panjang jalan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pandeglang menurut kondisinya pada tahun 2017 adalah kondisi baik 66%, sedang 8%, rusak 13%, dan rusak berat 13%.

Berdasarkan uraian tersebut dipandang perlu dilakukan pembahasan terkait ketersediaan sumberdaya lahan dan aksesibilitas dalam upaya mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu informasi untuk mengetahui pentingnya akses pangan dalam hal ini ketersediaan lahan dan aksesibilitas di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

METODE

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan September 2020 di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi pendahuluan sistem ketersediaan lahan dan aksesibilitas terdiri dari penelitian dan pengumpulan informasi (*research and information collecting*) teori, hasil studi dan informasi yang relevan dengan masalah dibidang ketahanan pangan. Mencakup assessment kebutuhan, kajian pustaka, studi penelitian berskala kecil, penyiapan laporan, pertimbangan nilai yang berlaku dilokasi penelitian di Kabupaten Pandeglang.
2. Mengembangkan analisa awal mencakup penyiapan data terkait sistem ketersediaan lahan dan aksesibilitas di Kabupaten Pandeglang dalam upaya mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan.

3. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi potensi ketersediaan lahan dan aksesibilitas dalam upaya mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan.

Peubah yang diamati dalam kegiatan penelitian ini antara lain terkait luas lahan dan ketersediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Pandeglang. Metode model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan teknik survei. Menurut Sugiyono (2013:11) pengertian metode survey adalah: “Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis”.

Penggunaan metode survei untuk mempermudah peneliti melaksanakan penelitian, pada penelitian menjelaskan mengenai prosedur penelitian yang akan

dilaksanakan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat umum.

Analisis data yang dilakukan berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan mencakup metode analisis kuantitatif maupun kualitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis terhadap data yang berkaitan dengan aspek luas lahan sedangkan analisis kualitatif lebih terfokus pada aspek sarana prasaran yang mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang

HASIL PENELITIAN

Potensi dan Ketersediaan Lahan

Potensi dan Ketersediaan lahan merupakan peluang dalam mendukung ketahanan pangan. Karena potensi dan ketersediaan lahan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, yang mana ketersediaan lahan dapat mendukung kebutuhan pangan. Apabila

optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang ada saat ini dilakukan lebih produktif dan lestari, baik secara kuantitas (luasan) maupun kualitas (kesuburan/ produktivitas), maka dapat mendukung ketersediaan kebutuhan pangan.

Pandeglang memiliki luas wilayah 2.746.89 km² dengan luas lahan berdasarkan penggunaan diantaranya hutan belukar 50.888,90 Ha; hutan lebat 10.099,51; hutan sejenis 13.778,12; kebun campuran 86.517,33; padang 19.754,73; perairan darat 2.202,57; perkampungan 5.746,69; perkebunan besar 5.272,54; persawahan 34.391,28; sungai/danau 1.354,27; tanah terbuka 1.139,78; dan tegalan/ladang 47.893,65 (*Pandeglang Dalam Angka 2019*).

Penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang didominasi oleh lahan kehutanan, pesawahan dan perkebunan besar. Pada tahun 2019 lahan menurut penggunaan adalah hutan campuran 86.517,33 Ha atau sekitar 31% dari luas penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan 18,24% dari luas

penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang dengan luas lahan 50.888,90 Ha terdiri dari hutan belukar. Luas lahan persawahan 34.391,28 atau sekitar 12,32% dari luas penggunaan lahan dan penggunaan untuk ladang adalah 47.893,65 atau 17% dari luas penggunaan lahan.

Luas lahan berdasarkan penggunaan di kabupaten Pandeglang, dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Luas Lahan Menurut Penggunaan dan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang (Hektar), 2018

No	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Tegal	Ladang	Perkebunan	Hutan Rakyat	Padang Rumput	Hutan Negara	Tidak Diusahakan	Lainnya			
1	Sumur	1 198	638	570	0	0	1008	0		21 951	35	155		
2	CImanggu		1 467		1 873		8 451	956	0	11230	0	0	49	45
3	Cibaliung		235		241		3 291	4 894	700	5861	0	4740	2114	710
4	Cibitung		421		429		6 502	2 748	404	6501	0	0	43	20
5	Cikeusik		1 620		3 672		5 350	5 182	4551	1713	0	0	1670	7470
6	Cigeulis		321		666		7 225	2 722	507	1713	288	0	0	3497
7	Panimbang		0		3 130		2 333	3 353	0	3315	0	0	0	612
8	Sobang		0		3 320		2 855	2 751	952	1950	0	0	521	1078
9	Munjul		514		981		1 821	1 588	1 297	865	0	0	0	224
10	Angsana		50		2256		998	1 583	0	241	0	0	0	871
11	Sindangresmi		0		2163		625	923	1 065	935	98	390	0	2
12	Picung		433		1034		1 802	433	745	351	0	0	0	376
13	Bojong		287		785		1 443	198	271	1382	99	0	238	115
14	Saketi		1 071		550		1 476	1 567	131	40	3	0	0	102
15	Cisata		849		299		802	364	58	464	0	0	0	161
16	Pagelaran		388		2045		531	324	0	19	0	0	0	312
17	Patia		0		2469		761	378	378	130	0	112	0	116
18	Sukaesmi		240		2683		917	205	214	112	0	0	113	469
19	Labuan		251		155		492	38	0	0	0	0	0	61
20	Carita		791		251		1 397	29	0	284	0	1233	0	0
21	Jiput		1589		0		1 299	66	0	405	0	1573	0	146
22	Cikedal		855		58		1 034	0	0	0	0	0	0	315
23	Menes		1034		110		789	0	0	0	0	0	33	115
24	Pulosari		1 005		317		296	0	897	30	0	406	50	45
25	Mandalawangi		900		1033		5069	0	0	308	9	0	0	99
26	Cimanuk		1858		0		172	18	0	40	0	0	0	64
27	Cipeucang		904		53		285	124	25	48	0	50	13	324
28	Banjar		671		158		976	0	168	598	0	0	0	26
29	Kaduhejo		504		327		490	329	404	300	0	0	0	3
30	Mekarjaya		731		0		53	0	258	1189	0	0	0	10
31	Pandeglang		467		0		276	0	0	224	0	0	0	243
32	Majasari		504		6		440	150	0	83	0	238	91	1002
33	Cadasari		646		10		1 509	75	0	21	0	52	0	5
34	Karangtanjung		583		15		587	137	0	53	0	190	0	10
35	Koroncong		359		295		414	273	0	0	0	0	0	122

Sumber: Pandeglang dalam Angka 2019

Berdasarkan data Tabel 1 di atas menjelaskan bahwa meskipun lahan yang sesuai cukup luas dan sebagian besar lahan telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian. Potensi lahan yang cukup luas memberikan pengaruh signifikan terhadap luas panen hasil pertanian dan tingkat kesejahteraan petani sehingga dapat mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang. Wahed Mohammad, 2015 mengemukakan bahwa ketahanan pangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan petani padi. Sejalan dengan teori yang ada, mengingat pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting, jika kebutuhan pangan terpenuhi di masyarakat maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut baik (Purnawijayanti, 2001).

Tantangan ketersediaan lahan tidak hanya khas untuk Indonesia, tetapi juga tingkat dunia. Analisis oleh Lambin dan Meyfroidt (2011) menunjukkan bahwa menjelang tahun 2030 diperlukan antara 125

sampai 416 juta ha lahan untuk pertanian dan padang gembala, namun di sisi lain sekitar 48 sampai 100 juta ha lahan juga diperlukan untuk perkembangan perkotaan. Lebih jauh sekitar 30 sampai 87 juta ha lahan pertanian yang ada mengalami degradasi sehingga menurun produktivitasnya. Kebutuhan untuk berbagai penggunaan lahan ini akan menyebabkan lahan hutan semakin terdesak dan ini dapat berimplikasi terhadap tata air.

Dari hasil penelitian Farida Afriani Astuti dan Herwin Lukito, 2020 mengemukakan bahwa perubahan penggunaan lahan pada Kawasan Keamanan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman mencapai 57,33 km² atau 33,93% dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Perubahan penggunaan lahan didominasi oleh perubahan lahan sawah menjadi hutan seluas 15,05 km². Faktor pendorong adanya perubahan penggunaan lahan tersebut adalah produktivitas pertanian sawah yang semakin menurun tiap tahunnya. Akibatnya banyak pemilih lahan sawah yang

mengubah fungsi sawah menjadi peruntukan lain, seperti hutan produksi, permukiman, kebun, dan tegalan. Perubahan penggunaan lahan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar jika dibandingkan tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan sawah. Perubahan penggunaan lahan pertanian pada Kawasan Keamanan dan Ketahanan Pangan yang tidak terkontrol akan berdampak pada ketersediaan dan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman.

Aspek Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu sistem dalam ketahanan pangan, karena sistem yang menghubungkan antara sistem ketersediaan dan sistem penyerapan pangan. Beberapa faktor kunci untuk mendukung keberhasilan peningkatan aksesibilitas pangan antara lain adalah : (i) Program peningkatan Aksesibilitas Pangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari program Pembangunan Ketahanan Pangan; (ii) Penetapan skala prioritas kegiatan sesuai dengan ketersediaan sumberdaya

pembangunan; (iii) Identifikasi, interaksi dan koordinasi serta pembagian tugas dan kewenangan secara jelas dan sinergis antar institusi terkait di tingkat pusat; (iv) Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas antara pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dalam pelaksanaan program peningkatan aksesibilitas pangan; (v) Komitmen semua instansi terkait di setiap level pemerintahan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan; (vi) Fasilitasi peningkatan peran masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan (Handewi P.S. Rachman, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian dibahas terkait faktor aspek aksesibilitas melalui pengukuran aspek akses pangan dengan menggunakan indikator-indikator yang terkait kondisi penduduk diantaranya yaitu (1) persentase penduduk miskin, (2) persentase penduduk tidak akses listrik, dan (3) persentase penduduk tidak bekerja. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan:

a. Persentase penduduk miskin

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang 115,90 (ribu orang). Dengan adanya data tersebut bahwa diketahui masih terdapat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang. Penduduk miskin dapat berpengaruh dengan ketahanan pangan di wilayah tersebut karena salah satu indikator pencapaian ketahanan pangan bagi penduduk miskin terkait akses terhadap pangan yang dipengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli pangan tersebut. Berdasarkan penelitian Zakiah, 2016 bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan ketahanan pangan karena kemiskinan menyebabkan keterbatasan untuk mengonsumsi pangan. Selain itu, Kemiskinan secara tidak langsung merupakan indikasi lemahnya pemenuhan kebutuhan makanan di tingkat rumah tangga baik karena rendahnya pendapatan masyarakat maupun

karena tidak meratanya distribusi pangan sehingga menjadikan mereka sebagai komunitas yang rawan pangan. Karena itu hubungan antara kemiskinan dengan ketahanan pangan sangat erat baik secara mikro di tingkat rumah tangga maupun secara makro di tingkat komunitas (wilayah).

b. Persentase tidak akses listrik

Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Semakin tinggi akses listrik suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar dalam peningkatan perekonomian daerah. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah memiliki rumah dan lingkungan yang nyaman. Di Kabupaten Pandeglang sebanyak 91,78 persen penduduk pada tahun 2017 sudah memiliki rumah milik sendiri. Jumlah kepemilikan rumah dengan status milik sendiri sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016. Namun, untuk sumber penerangan hampir 100 persen rumah tangga menggunakan listrik baik dari PLN maupun NonPLN (BPS, 2018). Berdasarkan data

tersebut ditahun 2017 sebagian besar Kabupaten Pandeglang telah memiliki akses listrik. Kebutuhan akses listrik berkaitan dengan kesejahteraan bagi masyarakat, karena dengan adanya jaringan listrik PLN, masyarakat dapat beraktivitas dengan memanfaatkan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga kebutuhan listrik sangat mendukung terwujudnya ketahanan pangan pada wilayah di Kabupaten Pandeglang.

Menurut Nuhfil Hanani, 2009 bahwa listrik merupakan faktor yang mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Dinamika ekonomi akan semakin tinggi dengan adanya listrik yang dapat diakses masyarakat disuatu wilayah. Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk meningkatkan volume pekerjaan yang telah dijalankan atau menambah peluang kerja baru yang lebih baik. Indikator ini merupakan indikasi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

c. Persentase penduduk tidak bekerja

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di wilayah Kabupaten Pandeglang persentase penduduk tidak bekerja berkisar 41.56%, angka tersebut sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Salah satu pengaruh ketahanan pangan adalah tingkat pendapatan, karena semakin tingginya kesejahteraan rumah tangga maka pengeluaran pangan rumah tangganya semakin kecil. Penelitian yang dilakukan Abdul Halik (2007) menunjukkan faktor dominan yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan adalah luas lahan, tingkat pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Selain itu beberapa penelitian yang mendukung antara lain penelitian yang dilakukan oleh Arene dan Anyaeji (2010) menyebutkan bahwa salah satu faktor dominan yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah pendapatan per kapita. Faktor ini memiliki efek positif yang artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula probabilitas suatu rumah tangga masuk dalam kategori tahan pangan.

Selain itu akses pangan ditinjau dari ketersediaan prasarana

sebagai tempat menyediakan kebutuhan pangan diantaranya adalah koperasi dibidang pertanian. Kabupaten Pandeglang, sebagai salah satu daerah otonom yang berada di Provinsi Banten memiliki potensi perekonomian yang cukup besar, khususnya dibidang pertanian, industri berbasis hasil pertanian, dan pariwisata. Sehingga tidak bisa disangkal jika tenaga kerja terserap disektor terkait cukup besar. Luas lahan basah (sawah) di Kabupaten Pandeglang mencapai hampir 20 persen dari luas wilayah Kabupaten Pandeglang dan garis pantai yang panjang, merupakan salah satu bukti besarnya potensi ekonomi disektor pertanian (pertanian tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasilnya, kehutanan, dan perikanan). Hal ini dibuktikan juga dengan tingginya distribusi pertanian terhadap pembentukan nilai tambah bruto Kabupaten Pandeglang yang mencapai 34,36 persen. Selain itu telah dikenalnya daerah pengumpulan ikan dan hasil laut lainnya di wilayah pantai Kabupaten Pandeglang yang men-

supply banyak wilayah, khususnya Banten dan Jakarta.

Besarnya potensi pertanian di Kabupaten Pandeglang hendaknya ditanggapi dengan program atau kebijakan yang mendukung penguatan sektor pertanian sebagai sektor andalan. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pengawasan kepada petani dan buruh tani sehingga hasil pertanian dapat meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Memperkuat jaringan distribusi penyaluran hasil pertanian dan insentif bagi pelaku pertanian dan sektor lain yang memanfaatkan hasil pertanian lokal secara langsung sehingga nilai tambah terbentuk dari sektor pertanian dan hasil olahannya akan meningkat. Secara tidak langsung juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Pandeglang. Salah satunya dengan memperbanyak industri yang berbasis pertanian.

Koperasi petani sebagai salah satu upaya penyelesaian permasalahan pembiayaan juga harus didorong untuk memajukan sektor pertanian dan sektor hilir yang

memanfaatkan hasil pertanian. Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah hendaknya mendapat porsi kredit cukup besar bagi pengusaha pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian. Tidak cukup dengan mendapatkan porsi yang besar, kemudahan dalam proses serta penyertaan penjaminan yang mudah dipenuhi, harus diperhatikan. Peran lembaga keuangan sangat baik adalah koperasi yang dikelola langsung oleh petani dan atau pengusaha hasil pertanian. Dengan menempatkan azas kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi. Disamping itu juga sangat penting membekali petani mengenai informasi perbankan.

Dengan tingginya potensi pertanian di Kabupaten Pandeglang, ketersediaan koperasi menjadi prasarana penting dalam upaya mendukung ketahanan pangan. Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem, yaitu: Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, Distribusi pangan yang lancar dan merata, dan Konsumsi pangan setiap

individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan. Koperasi mempunyai peran tersendiri dalam upaya mendukung ketahanan pangan. Menurut Susilo Edi, 2013 bahwa dalam rangka mewujudkan sistem ketahanan pangan, koperasi agribisnis perlu melakukan revitalisasi peran dan fungsinya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh koperasi agribisnis agar ketahanan pangan dapat tercapai untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat antara lain:

1. Melakukan revitalisasi dan konsolidasi internal
Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi menurun, seiring kebijakan Pemerintah terhadap Koperasi yang tidak konsisten dan karena kelemahan Manajemen Koperasi itu sendiri. Koperasi perlu melakukan konsolidasi internal untuk memperbaiki ketatalaksanaan usaha (Corporate Governance) yang lebih baik.
2. Terlibat secara aktif dalam revitalisasi pertanian

- Koperasi agribisnis perlu meningkatkan kemampuannya dalam bidang teknologi bercocok tanam yang efektif dan produktif agar dapat mentransfer knowledge (pengetahuan) kepada anggota dan masyarakat
3. Membuat skim pembiayaan yang tepat untuk sektor pertanian
Sektor Pertanian (agribisnis) memiliki karakteristik yang berbeda dari sector yang lain seperti perdagangan, jasa dan industri. Maka koperasi agribisnis harus memiliki kemampuan untuk mendesain produk dan skim yang cocok untuk meningkatkan produksi anggotanya, karena sector ini biasanya sangat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi harga yang tinggi.
 4. Tidak tergantung pada dana bantuan pemerintah
Jika dimasa lalu Koperasi yang bergerak di bidang agribisnis utamanya KUD sangat tergantung dengan dana bantuan Pemerintah, maka saat ini tidak zamannya lagi Koperasi Agribisnis sebagai Badan Usaha tergantung dengan bantuan Pemerintah. Koperasi harus bisa mandiri dengan menggali potensi di daerah tempat berdomisili dan memberdayakan anggota dengan baik.
 5. Menggali potensi agribisnis yang sesuai dengan masyarakat dimana koperasi berada
Koperasi agribisnis harus menjadi koperasi komoditas terbatas yang diusahakan petani dan mencakup keseluruhan sistem agribisnis. Bisnis Koperasi harus disesuaikan dengan masyarakat lokal dimana Koperasi berada, sehingga tercipta Koperasi agribisnis kopra, kelapa sawit, karet, lada, gula, beras, jagung, ikan, mangga, dan lainnya. Bisnis utama koperasi agribisnis melayani on-farm tapi kegiatannya melebar ke

hulu, hilir, dan jasa yang menunjang on-farm. Dan secara lambat laun merebut kesempatan bisnis di hulu, hilir, dan jasa penunjang agribisnis, serta mampu bekerjasama dengan pihak-pihak yang sudah ada di jalur bisnis tersebut.

6. Merambah pasar ekspor.

Koperasi Agribisnis harus mengambil peran sebagai penggerak dan pembuka pasar agribisnis untuk ekspor. Karena kunci utama untuk penumbuhan usaha agribisnis adalah penguasaan target pasar yang jelas, kemampuan bersaing dari produk sejenis, mutu, harga, pelayanan dan kontinuitas suplai. Agribisnis dengan skala menengah hingga besar memerlukan tambahan persyaratan kualitas produk yang memenuhi skala ekonomi dan penyediaan produk secara kontinyu.

Koperasi khususnya KUD memiliki potensi yang besar dan telah memberikan

kontribusi yang nyata bagi pembangunan. Aktivitas KUD memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pencapaian SDGs terutama pada tujuan-tujuan pengentasan kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan yang baik dan kesejahteraan; kesetaraan gender; dan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Wahyudi Jatmiko. 2017).

KESIMPULAN

1. Potensi dan ketersediaan lahan di Kabupaten Pandeglang cukup luas yang didominasi oleh lahan kehutanan, pesawahan dan perkebunan besar.
2. Pengukuran aspek akses pangan menggunakan indikator-indikator yang terkait kondisi penduduk diantaranya yaitu persentase penduduk miskin, persentase penduduk tidak akses listrik, dan persentase penduduk tidak bekerja.

3. Koperasi dibidang pertanian merupakan salah satu prasarana sebagai tempat menyediakan kebutuhan pangan

DAFTAR PUSTAKA

- Arene dan Anyaeji. 2010. Determinants of Food Security among Households in Nsukka Metropolis of Enugu State, Nigeria. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)* Vol. 30, No. 1 (September 2010), pp. 9-16.
- BPS Provinsi Banten, 2019. Provinsi Banten Dalam Angka.
- Chrisman, N. 1997. *Exploring Geographic Information Systems*. New York: John Willey.
- Farida Afriani Astuti dan Herwin Lukito, 2020. Perubahan Penggunaan Lahan di Kawasan Keamanan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Geografi* 17(2) (2020) 1-6.
- Handewi P.S. Rachman. 2010. Aksesibilitas Pangan: Faktor Kunci Pencapaian Ketahanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Pangan*. Vol. 19 No. 1 Juni.
- Lambin E dan Meyfroidt P. 2011. Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. *PNAS*. 108(9):3465±3472. doi: 10.1073/pnas.1100480108.
- Nuhfil, Hanani. 2009. Masa Depan Pembangunan Ketahanan Pangan Indonesia. <http://lecture.brawijaya.ac.id>.
- aputra Debrio Trio. 2017. Hasil Kedelai (*Glycine max* L.) dan Jagung (*Zea mays* L) sebagai Tanaman Sela di Tegakan Kelapa Sawit Belum Menghasilkan Pada Sistem Pertanaman Berebeda. Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pekanbaru. Skripsi.
- Suryawan Ida Bagus, I Gusti Putu RA, dan I Nyoman Dibia. 2020. Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Beberapa Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. *Jurnal Agroekoteknologi Tropika*. Vol.9 No. 1 (ISSN: 2301-6515).
- Susilo Edi. 2013. Peran Koperasi Agribisnis Dalam Ketahanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* Vol. 10 No. 1.
- Wahyudi Jatmiko. 2017. Kontribusi Koperasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus KUD Bahagia Kabupaten Pati). The 6th University Research Colloquium. Universitas Muhammadiyah Magelang ISSN 2407-9189.

Zakiah. 2016. Ketahanan Pangan Dan Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 14 No. 2, Desember 2016: 113-124 DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v14n2.2016.113-124>